

# PERAN LURAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOROK PAKJO KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG

Oleh :

Nama : Vicky Damaris

Nim : 20.11.097

Program Studi : Administrasi Negara

## ABSTRACT

VICKY DAMARIS, 2024. *The Role of Village Heads in Community Empowerment in Lorok Pakjo Village, Ilir Barat I District, Palembang City. Department of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA). Main Advisor (I) Ir. H. Heru Adi Putranto, M.Si, and Assistant Advisor (II) A. Ridhuan Habena, S.I.Kom., M.Si.*

*The regional autonomy policy in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, provides broad authority to regional governments to manage and administer various interests and welfare of regional communities according to the needs and potential of their regions. Community participation, equity and justice, and attention to regional potential and diversity. To realize community empowerment, welfare, and independence, it is necessary to be supported by participatory development management.*

*The purpose of this study is to determine and analyze the Role of Village Heads in Community Empowerment in Lorok Pakjo Village, Ilir Barat I District, Palembang City. Department of Public Administration at the College of Administrative Sciences. The type of research used in this study uses a Qualitative Method that aims to understand a phenomenon scientifically by using observation data collection techniques, interviews, documentation, literature studies and data analysis techniques used data reduction, data storage, and drawing conclusions.*

*The Village Head as a Leader in the Creation of the Development Process to mobilize the community in their participation in development, a motivator or driving element is needed that is able to mobilize and direct the community's ability to realize development ideals. This is certainly related to efforts to carry out its role as a leader who motivates or mobilizes community participation in the Village.*

*Keywords: The Role of the Village Head; Community Empowerment*

## A. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerahnya. Selain itu fokus pemerintah daerah kepada masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu kepada prinsip-prinsip demokrasi.

Peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, Pada hakekatnya upaya untuk memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat diperlukan agar dapat memaksimalkan potensi diri dan lingkungannya. Upaya ini diperlukan agar masyarakat dapat mengidentifikasi, menganalisis,

menetapkan kebutuhan serta mampu menghadapi masalah yang dihadapi melalui pemilihan alternatif solusi dengan mandiri. Wujud nyata yang akan dihasilkan adalah terbentuknya keberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat perlu didukung oleh pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada tatanan pemerintahan diperlukan perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan bagi kepentingan bersama.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan dijelaskan bahwa Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan sangat

diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dengan berlandaskan prinsip pengelolaan pembangunan yang partisipatif. Pada lingkup pemerintah menghadirkan pemerintahan yang jujur, adil, demokratis dan bertanggung jawab begitupun pada tatanan masyarakat mereka dilibatkan dalam dalam proses pembangunan seperti pemberian kekuasaan untuk meningkatkan posisi sosial, ekonomi, budaya dan politik dari masyarakat lokal, sehingga masyarakat mampu memainkan peranan yang signifikan dalam pembangunan.

Pemerintah berkewajiban sebagai pemberi pelayanan, pemberdayaan serta dapat memberikan suasana baru kepada masyarakat agar mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat, untuk mendapatkan partisipasi aktif harus ada peran Lurah selaku kepala instansi Pemerintah dan Daerah di Tingkat Kelurahan Lorok Pakjo Palembang.

Lurah sebagai pemimpin di daerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan. Kelurahan dibangun berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Kelurahan adalah wilayah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Lurah sebagai pemimpin dan pelaksana proses pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 228 dan 229, di tuntut agar bisa membuat masyarakat sejahtera dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk bertujuan agar proses pembangunan berjalan sesuai tujuan pembangunan dan kemajuan suatu daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Bab III Kelurahan pasal 25 Bagian Kelima Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah Pasal 25 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.

Tugas lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan

g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi Lurah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu:

### **1. Motivasi**

Memotivasi masyarakat agar bergerak aktif dalam menjalankan dan mengikuti proses pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Lorok Pakjo Kota Palembang. (Djamarah 2002: 34). Pengertian Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan dan emosi sehingga mendorong individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena kebutuhan, keinginan dan tujuan.

### **2. Komunikasi**

Komunikasi antara manusia merupakan suatu rangkaian proses yang halus dan sederhana. Selalu dipenuhi dengan berbagai unsur-sinyal, sandi, arti tak peduli bagaimana sederhananya sebuah pesan atau kegiatan itu Komunikasi antar manusia juga merupakan rangkaian proses yang beraneka ragam. Komunikasi adalah suatu hubungan simbiosis mutualisme baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang saling berinteraksi baik dalam urusan pemerintahan maupun urusan kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12) Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pemberdayaan (empowerment) tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungan sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki.

Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: Kecenderungan primer.

Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kedua, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Kelurahan Lorok Pakjo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Lurah dalam pemberdayaan masyarakat mengalami kendala atau permasalahan yang di hadapi maka penulis mencoba untuk mengkaji 8 permasalahan yang terjadi di kelurahan Lorok Pakjo yaitu komunikasi, antara pihak kelurahan dan masyarakat yang kurang baik serta jadwal pengawasan dan Pelatihan/penyuluhan program UP2K naungan di PKK dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri, serta terbatasnya dana yang ada yang membuat kurangnya aktifitas kelurahan untuk mengawasi serta melaksanakan pembinaan dan pengarahan dalam pemberdayaan masyarakat.

Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuan keterampilan dengan diberikannya bantuan penguat modal usaha melalui program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) didalam meningkatkan penghasilan sebuah keluarga yang diperoleh dari usaha perekonomian melalui kegiatan berwirausaha sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya.

Dengan melihat realitas di atas peneliti merasa perlu untuk melihat seberapa jauh yang dilakukan tentunya memiliki sasaran atau tujuan yang jelas untuk dicapai, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I kota Palembang, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.”**

#### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?
2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat

di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang?

#### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Peran Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung peran Lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang.

#### **LANDASAN TEORI**

##### **Tinjauan Umum Peran**

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama.
- b. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan.
- c. Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Menurut Soerjono Soekanto (2009 : 212), “Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan”. Dalam pendapatnya Soerjono Soekanto (2009 : 212) menjelaskan : *“Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peran, Perbedaan antara kedudukan dan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan.”*

Adapun Soejono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

## LURAH

Lurah adalah pemimpin di daerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan. Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelurahan dibangun berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa Kelurahan adalah wilayah sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan pada Bab III Kelurahan pasal 25 Bagian Kelima Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah Pasal 25 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

Tugas lurah meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pemberdayaan Masyarakat

### Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pemberdayaan Masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Definisi pemberdayaan yang dikemukakan oleh Merriam Webster dan Oxford English Dictionary kata "empower" mengandung dua arti. Pengertian

pertama adalah *to give power of authority* dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian kedua, diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan Masyarakat menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu :

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja serta kekuatan yang terletak pada setiap individu. Pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan, orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan suatu keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan.

Himawan S. Pambudi, dkk (2003: 55-56), memberi cakupan terhadap aspek ketidakberdayaan rakyat, agar bisa memperlihatkan apa yang seharusnya menjadi orientasi dari pemberdayaan masyarakat tersebut:

- a. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
- b. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
- c. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib.
- d. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri..

e. Masalah kapasitas, untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

### **Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pemberdayaan masyarakat adalah menumbuhkan kembangkan potensi masyarakat, meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan, mengembangkan gotong-royong, bekerja bersama masyarakat, berbasis masyarakat, kemitraan dan organisasi masyarakat lain serta desentralisasi. Keberadaan prinsip pemberdayaan masyarakat dapat menumbuhkan peran aktif masyarakat, sehingga serangkaian kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik.

Rubin dalam Sumaryadi (2005: 94-96) mengemukakan 5 prinsip dasar dari konsep pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelolanya, meskipun orientasinya berbeda dari organisasi bisnis, dimana dalam pemberdayaan masyarakat keuntungan yang diperoleh didistribusikan kembali dalam bentuk program atau kegiatan pembangunan lainnya.

2. Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, kegiatan pelatihan merupakan unsur yang tidak bisa dipisahkan dari usaha pembangunan fisik.
4. Dalam implementasinya, usaha pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya, khususnya dalam hal pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah, swasta maupun sumber-sumber lainnya.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dengan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Bertolak dari pemahaman pemberdayaan sebagai salah satu sistem pendidikan, maka pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip:

1. Mengerjakan, artinya kegiatan pemberdayaan harus sebanyak mungkin melibatkan masyarakat untuk mengerjakan/ menerapkan sesuatu.
2. Akibat, artinya kegiatan pemberdayaan harus memberikan akibat atau pengaruh yang baik atau bermanfaat karena perasaan senang/puas atau kecewa akan mempengaruhi semangatnya mengikuti kegiatan belajar / pemberdayaan di masa-masa mendatang;
3. Asosiasi, artinya kegiatan pemberdayaan harus dikaitkan dengan kegiatan lainnya, sebab setiap orang cenderung untuk mengaitkan/ menghubungkan kegiatannya dengan kegiatan/ peristiwa yang lainnya.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.(Delivery dalam Sutrisno, 2005:17).

### **Pendekatan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan, dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan. Menurut Mardikanto (2012:161) bahwa "Pendekatan yang dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terbagi atas:

- a. Pendekatan Partisipatif  
Pendekatan partisipatif berorientasi pada

pendekatan dalam memberdayakan masyarakat secara aktif dalam berpartisipasi secara sadar dalam mengembangkan mengupayakan diri secara sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya melalui pengetahuan dan keterampilan.

b. Pendekatan Kesejahteraan

Pendekatan kesejahteraan merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan difokuskan dan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatan ini masyarakat menjadi indikator utama dalam pemberdayaan.

c. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan.

Pendekatan ini berorientasi pada program-program pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pendekatan pemberdayaan tersebut tergantung pada program yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menurut kartasasmita (1997) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan berikut:

**Pertama**, upaya itu harus terarah (targeted). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya;

**Kedua**, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksakana oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya, supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung-jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya;

**Ketiga**, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, menurut Suharto (1997) ada lima strategi yang dapat diterapkan yaitu:

1. Pemungkinan; yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat miskin berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat miskin dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

2. Penguatan; melalui memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat miskin dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat miskin yang menunjang kemandirian mereka;
3. Perlindungan; yaitu melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.
4. Penyokongan; atau memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat miskin mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.
5. Pemeliharaan; dalam arti memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

### Tahapan, Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Wilson (Sumaryadi, 2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberdayaan pada setiap individu dalam suatu organisasi, merupakan suatu siklus yang terdiri dari:

**Pertama**, menumbuhkan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki, maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak akan memperoleh perhatian, simpati, atau partisipasi masyarakat;

**Kedua**, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diharapkan;

**Ketiga**, mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan;

**Keempat**, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya;

**Kelima**, Peningkatan peran dan kesetiaan

pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi-motivasi untuk melakukan perubahan;

**Keenam**, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan;

**Ketujuh**, peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan baru.

Menurut United Nations (1956:83-92 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.
2. *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut
3. *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "the local leaders" harus selalu diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.
4. *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.
5. *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.
6. *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

7. *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.
8. *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program action tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.
9. *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.
10. *Helping people to continue to work on solving their problems*; Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.
11. *Increasing people's ability for self-help*; Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya.  
Menurut Kartasasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:
  1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
  2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan

membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

### **Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat**

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (top down), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001: 15) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

Menurut Wahab (2002:81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam empowerment, yaitu:

1. The welfare approach, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan

centrum of power yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

2. The development approach, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.
3. The empowerment approach, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan Ross (1987:77-78) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

1. Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *the single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang.
2. Pola pendekatan *the multiple approach*, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar.
3. Pola pendekatan *the inner resources approach* sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi concern akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

### **Lingkup Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Mardikanto (2012:113-117) Lingkup kegiatan Pemberdayaan terdiri dari: Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan.

#### **a. Bina Manusia**

Lingkup pemberdayaan dalam bina manusia difokuskan kepada 2 hal yaitu:

1. Upaya Peningkatan Kemampuan Masyarakat
  2. Upaya peningkatan posisi tawar masyarakat
- b. Bina Usaha
- Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan masyarakat akan mencakup banyak hal, seperti:
1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk.
  2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisiensi usaha, dan pengembangan jejaring kemitraan.
  3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal.
  4. Peningkatan aksesibilitas terhadap: modal, pasar, dan informasi.
- c. Bina Lingkungan
- Pembangunan telah membawa dampak negatif sebagai pencemaran lingkungan akibat dari adanya limbah industri dan rumah tangga. .
- d. Bina Kelembagaan
- Bina Kelembagaan tidak cukup dengan pembentukan lembaga-lembaga yang diperlukan, tetapi yang jauh lebih penting adalah seberapa jauh kelembagaan yang telah dibentuk itu telah berfungsi secara efektif.

#### **Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan memiliki indikator-indikator untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana pemberdayaan yang dilakukan pemerintah akan tercapai sesuai dengan harapan. Suharto (dalam Hatu, 2010:103) menjelaskan bahwa dimensi-dimensi yang dapat dijadikan indikator pemberdayaan masyarakat dalam suatu negara disesuaikan dengan program pembangunan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
- b. Peningkatan Pendapatan masyarakat
- c. Partisipasi dalam pembangunan.

#### **Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Adapun kerangka

berpikir dalam proposal penelitian ini dapat dilihat pada bagan berikut.

### **C. PROSEDUR PENELITIAN**

#### **Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan bagian penting dalam penyusunan penelitian ini. Metode penelitian adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan penelitian adalah memecahkan masalah. Dan langkah-langkah yang ditempuh dalam sebuah penelitian harus relevan dengan masalah yang dirumuskan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena dengan bentuk penelitian ini memungkinkan peneliti untuk dapat menggambarkan objek penelitian secara holistik berdasarkan realitas sosial yang ada di lapangan.

#### **Definisi Konsep**

Definisi konsep merupakan suatu cara yang berguna untuk memudahkan peneliti dalam memberikan arah dan kejelasan peneliti yang dilakukan. Konsep yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Lurah adalah suatu perbuatan kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Definisi Operasional**

Definisi Operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel penelitian dalam rincian yang terukur atau disebut indikator penelitian. Biasanya menggunakan matrik, indikator dan nomor pertanyaan sebagai lampiran. Melihat penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maka dalam penjelasan definisi operasional akan dikemukakan fenomena-fenomena penelitian yang tentunya dikaitkan dengan konsep teori yang digunakan. Berdasarkan rumusan pemikiran diatas. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasionalnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Definisi Operasional**

<b>No.</b>	<b>Konsep</b>	<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>
1.	Peran Lurah	1.Lurah sebagai pemimpin didaerah kelurahan agar terciptanya proses pembangunan.	Hubungan Lurah dan Masyarakat di dalam struktur sosial

	2. Lurah sebagai pemimpin dan pelaksana proses pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam Pasal 228 dan 229, dituntut agar bisa membuat masyarakat sejahtera dan berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan daerah baik dalam pemberdayaan masyarakat untuk bertujuan agar proses pembangunan berjalan sesuai tujuan pembangunan dan kemajuan suatu daerah.	Organisasi masyarakat.
2. Pemberdayaan Masyarakat	Undang-undang 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah, yang menjelaskan "pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat".	Proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui program dan kegiatan masyarakat.

### Informan Penelitian

Informan adalah orang yang bisa memberikan keterangan-keterangan atau informasi yang diperlukan oleh penelitian yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini informan ditentukan dengan melihat permasalahan yang diteliti agar diperoleh data yang sesuai dengan tujuan dari penelitian dan masalah yang telah dirumuskan. Jumlah dan penyebaran informan. Hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai masalah yang sedang di bahas. Informan penelitian itu adalah 1 orang Lurah, 1 orang Sekretaris lurah, 2 orang staf pegawai kelurahan, dan 3 orang masyarakat dalam ruang lingkupnya Kelurahan Lorok Pakjo. Dengan demikian keseluruhan informan berjumlah 7 orang, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel Informan Penelitian**

No.	Sumber Informan	Jumlah
1.	Lurah	1 Orang
2.	Sekretaris Lurah	1 Orang
3.	Staf Pegawai lurah	2 Orang
4.	Masyarakat Kelurahan Lorok Pakjo	3 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>7 Orang</b>

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)  
Pada sumber data ini, digunakan untuk mendapatkan konsep-konsep dan teori guna menunjang penelitian ini. Sumber data tersebut diperoleh dari berbagai bacaan.
2. Observasi

Suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

3. Wawancara (*Interview*)  
Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam.
4. Dokumentasi  
Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau human resources, melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.

### Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Dimana menurut Denzin dan Lincoln dalam Creswell yang dikutip oleh Rulam Ahmadi (2016:14) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah multimetode dalam fokus, termaksud pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap pokok permasalahannya.

Adapun dengan pendapat tersebut diatas, maka analisis yang digunakan adalah kualitatif, dimana data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan lorok Pakjo yang didapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dideskripsikan secara kualitas.

1. Data *Reduction* (reduksi data)  
Tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang didapat dari hasil penelitian kemudian direkam dalam bentuk catatan lapangan, selanjutnya melakukan

penyeleksian masing-masing data yang relevan dengan fokus penelitian.

## 2. Data *Display* (penyajian data)

Setiap data yang diperoleh, disajikan dalam bentuk daftar kategori kemudian melakukan penafsiran dan interpretasi sehingga dapat memperjelas atau menjawab masalah yang diteliti.

## 3. *Conclusion drawing/verification* (kesimpulan atau verifikasi)

Melakukan pemahaman terhadap informasi yang didapati, kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil Penelitian di Kelurahan Lorok Pakjo, bertujuan untuk mengetahui dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, jumlah pegawai 12 orang, berdasarkan pada masing-masing bidang di lingkungan kantor. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan pengamatan.

Hasil Penelitian ini untuk mengetahui peran lurah dalam pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang dan menguraikan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran pemerintah didalam pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat di kelurahan Lorok Pakjo.

### Peran Lurah

#### 1. Lurah sebagai Pemimpin Terciptanya Proses Pembangunan

Lurah merupakan faktor penentu dalam keberhasilan proses pembangunan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan lorok pakjo Oleh karena itu lurah beserta jajarannya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga keberhasilan program di kelurahan tergantung dari seberapa besar peranan pemerintah kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di wilayah kerjanya masing-masing begitupula peranannya dalam mempengaruhi masyarakat untuk turut serta di dalam sebuah program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo memiliki berbagai macam program pemberdayaan masyarakat pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pengembangan modal

simpan pinjam untuk perempuan dan pembinaan agama melalui lembaga masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa kelurahan Lorok Pakjo dalam proses pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan. Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat bina kelembagaan.

#### 2. Lurah Sebagai pemimpin Pelaksana Proses Pembangunan Dalam Pasal 228 dan Pasal 229

- (1) Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
  - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
  - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
  - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran Pemerintah kelurahan apabila pencapaian tujuan dari pada organisasi besar semakin besar pula tindakannya dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan fungsi ini dapat ditingkatkan melalui jabatan formal yang dimiliki oleh seorang pemimpin.

Serta proses berjalannya roda pemerintahan tidak lepas dari unsur-unsur penunjang yang dapat melancarkan kinerja. Lancarnya roda pemerintahan dapat memberikan efek yang positif jangka panjang, untuk itu unsur-unsur penunjang tersebut harus ditingkatkan Sarana dan prasarana dan menjaganya dengan baik.

Jika dilihat dari wawancara dan observasi lapangan penelitian lakukan dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pemerintah sebagai pelaksana proses pembangunan sudah melakukan

perannya bisa memberikan contoh kepada bawahannya dan masyarakat.

### **Pemberdayaan Masyarakat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kemudian dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 diatur di pasal 3 ayat (2) bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Agar peranan pemerintah dapat mempengaruhi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilihat melalui indikator-indikator perannya dalam membina kehidupan masyarakat desa yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan sebagai berikut.

#### **1. Bina Usaha**

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah keberdayaan yang bermuara pada perbaikan mutu hidup dan kemandirian untuk tercapainya kesejahteraan oleh karena itu peningkatan kemampuan masyarakat baik individu maupun kelompok harus diperhatikan. Pengembangan kapasitas manusia merupakan upaya pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan.

Di Kelurahan Lorok Pakjo bina usaha berfokus pada pengembangan usaha berbagai macam bantuan yang diberikan baik pemberian modal seperti bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam perempuan yang tentunya dapat membantu mengembangkan usaha mereka sehingga mereka punya daya untuk berkembang. Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang diperuntukan bagi masyarakat miskin dalam rangka membantu pengembangan usaha mereka. Setiap kelompok menerima besaran yang berbeda-beda, begitu juga untuk setiap orang menerima pinjaman berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

Dalam pemberdayaan perempuan melalui pinjaman modal terdapat empat kelompok simpan pinjam dimana dalam setiap kelompok terdiri dari 15 hingga 25 anggota. Kelompok simpan pinjam di kelurahan Lorok Pakjo meliputi kelompok simpan pinjam, kelompok simpan pinjam, kelompok

simpan pinjam sejahtera, dan kelompok simpan pinjam permodalan madani. Sebelum mendaftar menjadi anggota kelompok ada tanggung renteng atau komitmen dalam setiap kelompok yang harus dipegang teguh agar pengembalian modal berjalan dengan baik.

Syarat syarat untuk menjadi anggota SPP yaitu:

1. Membuat kelompok dan proposal
2. Masyarakat miskin
3. Masukkan KTP
4. Ada komitmen tanggung rente (tanggung resiko), artinya dalam anggota ada yang tidak membayar maka resiko dari kelompok tersebut menanggung pembayaran dari anggota yang menunggak.

Program ini ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu, sehingga diharapkan dengan modal yang diberikan dapat meningkatkan daya mereka untuk berkembang. Dana tersebut kebanyakan digunakan sebagai modal usaha ataupun kepentingan mereka yang mendesak.

Jadi bantuan modal untuk kelompok simpan pinjam diperuntukkan untuk pemberdayaan perempuan, jadi masyarakat yang ingin mendapatkan modal usaha diwajibkan membentuk 94 kelompok, memasukkan KTP dan menaati Tanggung Rente yang sudah disepakati. Program ini untuk modal usaha jadi sangat jelas untuk pengembangan usaha akan tetapi ada beberapa anggota kelompok yang menggunakan modal ini melenceng dari tujuan awalnya seperti anggota kelompok yang meminjam bantuan kemudian menyerahkan pinjaman itu ke pihak lain dengan bunga yang lebih tinggi ataupun menggunakan sebagian bantuan tersebut selain untuk mengembangkan usahanya. Serta kurangnya bentuk pengawasan dari penggunaan dana kelompok simpan pinjam ini merupakan hambatan dari tercapainya tujuan akhir pemberian modal ini.

Program bantuan modal simpan pinjam sangat membantu perekonomian kelompok perempuan dan merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan penghasilan masyarakat melalui pinjaman modal usaha. Peran pemerintah kelurahan dalam pemberian modal usaha spp adalah memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang ingin mendaftar menjadi anggota kelompok tersebut, membantu mensosialisasikan program tersebut dengan peruntukannya serta mengontrol penggunaan dana tersebut.

#### **2. Bina Lingkungan**

Lingkungan dan pemberdayaan mempunyai hubungan yang erat saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pemberdayaan

dalam hal ini berupa kegiatan usaha maupun kegiatan untuk kesejahteraan hidup orang banyak, pemberdayaan membutuhkan faktor lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial sebagai unsur produksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Lingkungan sosial, konteks sosial, konteks sosiokultural, atau *milieu*, adalah sesuatu hal yang didefinisikan sebagai suasana fisik atau suasana sosial dimana manusia hidup didalamnya, atau dimana sesuatu terjadi dan berkembang. Lingkungan sosial tersebut bisa berupa kebudayaan atau kultur yang diajarkan atau dialami oleh seorang individu, atau juga manusia dan institusi yang berinteraksi dengan individu tersebut (Barnett dan Casper, 2001:91).

## **Pembahasan**

### **Peran Lurah**

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dilakukan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perbuatan/kegiatan seseorang atas sesuatu pekerjaan dari suatu kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah melakukan sebuah peran. Jika dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan.

### **Pemberdayaan Masyarakat**

1. Masalah kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat begitu rendah.
2. Fokus dari permasalahan ini adalah terpenuhinya kebutuhan dasar seperti makanan, penghasilan, kesehatan, dan sebagainya.
3. Masalah akses terhadap sumberdaya, sebagian masyarakat elit dan kelas menengah memiliki akses dan kemudahan yang tinggi dan sebagian yang lain tidak memiliki akses dan termarginal.
4. Masalah kesadaran, massa rakyat umumnya percaya bahwa keadaan mereka berkaitan dengan nasib.
5. Sebagian dari golongan elit mensosialisasikan masalah ini secara sistematis, apakah melalui lembaga pendidikan, media massa atau media

lain.

6. Kemampuan massa rakyat untuk memahami persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat terbatas.
7. Sebagai akibatnya, banyak masalah tidak bisa diselesaikan substansial dan cenderung diselesaikan dengan cara karikatif (bantuan karena belas kasihan).
8. Masalah partisipasi, umumnya rakyat memiliki keterlibatan yang sangat kecil atau tidak sama sekali dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri mereka sendiri. Dapat dikatakan nasib rakyat ditentukan oleh golongan elit.
9. Masalah kapasitas untuk ikut memberikan kontrol dan mengendalikan proses penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan dan berbagai relasi yang ada.

Pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Kata pemberdayaan mengesahkan arti adanya sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: *Pertama*, kecenderungan primer. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kedua proses tersebut saling terkait, dan agar kecenderungan primer dapat terwujud, sering harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Dengan demikian pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, yang memiliki kekuasaan dan pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri,

mampu menyelesaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan ekonomi rakyat.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

#### 1. Peran Lurah

Lurah sebagai Pemimpin Terciptanya Proses Pembangunan untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya motivator atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan. Sebagai pimpinan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan Lorok Pakjo tentunya memiliki tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan. Hal ini tentunya berkaitan dengan upaya menjalankan perannya sebagai pimpinan yang memotivasi atau menggerakkan agar partisipasi masyarakat di Kelurahan.

#### 2. Pemberdayaan Masyarakat

Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Lurah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Kelurahan Lorok Pakjo adalah ada tingkat kehadiran masyarakat. Masih rendahnya tingkat kehadiran atau partisipasi masyarakat sehingga menghambat tercapainya tujuan pembangunan di Kelurahan Lorok Pakjo.

### Saran

#### 1. Peran Lurah

Peningkatan dan penguatan peranan pemerintah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, karena masih belum sepenuhnya masyarakat ikut aktif berperan, masyarakat karena pada hakikatnya sasaran pembangunan dan pemberdayaan adalah kesejahteraan masyarakat agar tercapai hidup sejahtera semua warga masyarakat kelurahan Lorok Pakjo.

#### 2. Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Kelurahan Lorok Pakjo, yaitu dengan menambahkan jumlah pembina, karena dengan semakin banyaknya pembina yang membantu masyarakat khususnya kaum wanita yang mau maju dan berkembang dengan program ini, akan semakin banyak pula masyarakat menuju pada perkembangan personal dan kelompok untuk kualitas hidup yang lebih baik.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- ASIRI, A. (2016). *Model Sistem Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Sulawesi Selatan (Doctoral dissertation, Pascasarjana)*.
- Bahri, E. S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*. Fam Publishin.
- Destiani, R., Suparman, A. N., & Mutholib, A. (2022). *Pemberdayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Di Desa Karang paningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis*.
- Dwiyanto, B. S., & Jemadi, J. (2013). *Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM mandiri perkotaan*. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 3(1), 36-62.
- Farisi, M., & Darminto, C. (2017). *Pendampingan Pelaksanaan Demokrasi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Kelembagaan Di Desa Penyengat Olak Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi*.
- Hadi, A. P. (2010). *Konsep pemberdayaan, partisipasi dan kelembagaan dalam pembangunan*. Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA).
- Hatu, R. (2010). *Pemberdayaan dan pendampingan sosial dalam masyarakat (suatu kajian teortis)*. *Jurnal inovasi*, 7(04).
- Kamaluddin, A. K., & Tamrin, M. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Skema Perhutanan Sosial di Area KPH Ternate-Tidore*. *Techno: Jurnal Penelitian*, 8(2), 308-317.
- Kanza, E. (2021). *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Kelurahan Pekan Arba Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)*.

- Kusmana, E., & Garis, R. R. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 460-473.
- Margayaningsih, D. I. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Publiciana*, 9(1), 158-190.
- Margayaningsih, D. I. (2016). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. Publiciana*, 9(1), 158-190.
- NIM, M. M. (2015). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara). GOVERNANCE, Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(3).
- Nissa, Z. (2019). *Implementasi Manajemen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Di SMA Al-Azhar Mandiri Palu (Doctoral dissertation, IAIN Palu)*.
- Palandung, J. H., Liando, D., & Sampe, S. (2018). *Pemberdayaan Politik Perempuan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Palit, T., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2018). *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Ponompiaan Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow. JURNAL EKSEKUTIF*, 1(1).
- Pelenkahu, M. G., Gosal, R., & Sambiran, S. (2017). *Peran Lurah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Kelurahan Mahakeret Timur Kecamatan Wenang Kota Manado). Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Ratnawati, R., Mappamiring, M., & Mone, A. (2017). *Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 3(3), 342-358.
- Sahputra, B. S., & Srihardjono, N. B. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Tpst 3R-Desa Mulyo Agung. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 7(3).
- Septiyana, M. (2017). *Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Usaha Kecil Tasbih dan Aksesoris (Studi Kasus di Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember). FISIP Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Setiani, M., & Sugiyanto, E. (2021). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pengembangan Desa Wisata (Studi di Desa Penusupan, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah). Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 57-67.
- Situmorang, V., Sutrisno, N., & Pramulanto, H. (2021). *Pengaruh Total Productive Maintenance (TPM) Terhadap Kelancaran Produksi Perusahaan PT. NGK Ceramics Indonesia. Jurnal Mitra Manajemen*, 5(6), 357-371.
- Suwarti, T. S., Lestari, S., & Widiyanto, M. W. (2022). *Implementasi Blended Learning pada Pembelajaran Bahasa Inggris di SD Kebon Dalem 2 Semarang Tahun Akademik 2021/2022. Media Penelitian Pendidikan: Jurnal Penelitian dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran*, 16(1), 34-38.
- Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Ulum, F. (2014). *Optimalisasi Intermediasi dan Pembiayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(1), 161-192.
- Yunita, F. A., Hardiningsih, H., & Yuneta, A. E. N. (2019). *Model Pemberdayaan Ibu Balita Tentang MP-ASI di Kelurahan Wonorejo Kabupaten Karanganyar. PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, 7(1), 14-18.